



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Mei 2018/Periodik - 2017)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH KONSTITUSI  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT JENDERAL  
**SUB UNIT KERJA** : PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, PENGELOLAAN  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : YUNI SANDRAWATI
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN  
PERKARA, PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
3. NHK : 139796

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.705.920.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m2/128 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI		Rp. 405.920.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/177 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI		Rp. 1.300.000.000
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>192.000.000</b>
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI		Rp. 10.000.000
2. MOBIL, HONDA BR-V MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI		Rp. 182.000.000
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>65.725.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>36.704.894</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>140.383.384</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.140.733.278</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>162.891.800</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.977.841.478</b>

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **27 September 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.